

## **ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSEPSI WAJIB PAJAK RODA DUA DI BELAKANG PADANG BATAM**

### ***ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX COMPLIANCE REVIEWED FROM TWO WHEEL TAX PERCEPTION BEHIND PADANG BATAM***

**Firdaus Hamta<sup>1</sup>, Rahma Putria Bahri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>2</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>1</sup>cafana07@gmail.com

#### **Abstrak**

Kepatuhan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Riau yang pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan daerah, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, kepustakaan, wawancara. Objek penelitian dipilih di ibu kota Kecamatan Belakang Padang karena letak geografisnya terpisah dari pulau Batam. Artinya bahwa Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor di Belakang Padang jauh dan di pisahkan oleh laut dari lokasi pelayanan SAMSAT Batam. Akibatnya WP Kendaraan bermotor di daerah tersebut kesulitan bahkan menghindari kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian bahwa faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Belakang Padang adalah faktor sosial, meliputi: kualitas pelayanan, keikhlasan, motivasi, kendala serta kontribusi pajak kendaraan bermotor. Persepsi wajib pajak-KB R2 di Belakang Padang bahwa: (a) membayar pajak KB-R2 untuk menghindari denda; (b) Tidak membayar PKB-R2 karena tidak terdapat razia pajak KB; (c) karena kesulitan ekonomi; (d) karena sulit menjangkau pelayanan SAMSAT akibat waktu dan kondisi geografis; (e) kurang memahami fungsi pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*

#### **Abstract**

*Compliance with motor vehicle tax is one of the sources of Regional Original Income (PAD) in the Riau Islands Province, where utilization is used for regional development, so motor vehicle tax compliance is very important to be considered by the Riau Islands Provincial Government. This study uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through observation, literature, interviews. The object of the study was chosen in the capital city of the District of Behind Padang because of its geographical location separate from the island of Batam. This means that the taxpayer (WP) of motorized vehicles in the back of Padang far and separated by the sea from the location of SAMSAT Batam service. As a result, motor vehicle taxpayers in the area have difficulty even avoiding the obligation to pay motor vehicle tax. The results of the study that the dominant factors that affect the level of compliance with paying motor vehicle tax in Padang behind are social factors, including: service quality, sincerity, motivation, constraints and vehicle tax contributions motorized. The KB-taxpayer R2's perception behind Padang that: (a) pays the KB-R2 tax to avoid fines; (b) Not paying*

*PKB-R2 because there is no KB tax raid; (c) because of economic difficulties; (d) because it is difficult to reach SAMSAT services due to geographical time and conditions; (e) lack of understanding of the function of motor vehicle tax.*

**Keywords:** *Vehicle Tax; Tax Compliance*

## LATAR BELAKANG

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber PAD yang strategis bagi daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, maka penyelenggaraan pemungutan PKB harus dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan realisasi penerimaan secara optimal, seperti pengembangan kualitas pelayanan sumber daya manusia, modernisasi pelayanan, serta kebijakan dan perhatian yang relevan dengan keadaan di masyarakat, hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena fungsi PKB diyakini salah satu sumber pendapatan terbesar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PAD itu sendiri merupakan penopang pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

PKB terdiri dari Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) atau lebih. Penelitian ini memfokuskan pada PKB R2 karena umumnya R2 adalah kendaraan utama masyarakat di Belakang Padang.

Belakang Padang sebagai pusat kecamatan untuk pulau-pulau kecil di sekitar Batam dan letak geografis diluar dari pulau Batam, sehingga untuk ke Batam dapat ditempuh lebih kurang 25 menit dengan menggunakan kendaraan boadt kecil. Hal ini membuat WP-PKB R2 mengalami kesulitan untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena akses pelayanan SAMSAT berada di Batam.

Akibatnya pembayaran PKB-R2 belum menjadi kebiasaan, sehingga fenomena yang terjadi adalah ketidakpatuhan membayar PKB-R2 di Belakang Padang. Faktor lain disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar PKB dan belum optimalnya sosialisasi serta penagihan dari instansi yang terkait.

Perilaku WP-PKB R2 tersebut, maka dianggap perlu mengetahui persepsi yang dapat menginformasikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan PKB-R2 di Belakang Padang.

## Rumusan Penelitian

- 1) Faktor apa yang dominan mempengaruhi kepatuhan PKB-R2 di Belakang Padang?
- 2) Bagaimana persepsi WP-KB terhadap PKB di Belakang Padang?

## Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor yang dominan terhadap kepatuhan PKB-R2 di Belakang Padang.
- 2) Untuk mengetahui persepsi WP-KB terhadap PKB di Belakang Padang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2011).

Menurut P.J.A. Andriani (2005) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009).

### **Indikator Kepatuhan Pajak**

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu:

#### **1. Faktor individu**

Meliputi: pemahaman membayar PKB, Sanksi PKB, kerelaan membayar PKB.

Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan

dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya.

#### **2. Faktor ekonomi**

Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

#### **3. Faktor sosial**

Faktor yang cukup menonjol adalah kualitas pelayanan dan motivasi. Pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai, motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Hobsor,2007) dalam Simanjutak dan Imam (2012).

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Belakang Padang yang merupakan salah satu bahagian dari Kecamatan di Kota Batam.

### **Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung Januari 2018 sampai April 2018.

### Informan

Informan ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian, meliputi: wajib pajak kendaraan bermotor R2 di Belakang Padang dan para ahli.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui: observasi, kepustakaan dan wawancara.

### Definisi Konseptual

Faktor-faktor kepatuhan, wajib pajak pada PKB-R2 di Belakang Padang diukur berdasarkan pendekatan teori Hobsor (2007) dan berdasarkan pada permasalahan yang relevan di lapangan, yakni meliputi:

1. Faktor individu  
Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
2. Faktor ekonomi  
Penghasilan, ekonomi rumah tangga, kebutuhan hidup, pendapatan yang cukup.
3. Faktor sosial  
Kualitas pelayanan, motivasi. Ikhlas, kendala, kontribusi.

### Analisis Data

1. Distribusi Frekuensi
2. Reduksi
3. Analisa dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## 1. Distribusi Responden

### a. Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 64,4%, dan wanita sebesar 35,6%.

### b. Pendidikan Terakhir

Responden berdasarkan pendidikan adalah Sarjana (S1)/D4 sebesar 2,2%, Diploma 3 9%, SMA 62,2%, SMP 11,1%, SD 13,3%.

### c. Pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan adalah Buruh 33,3%, Wiraswasta 31,1%, Swasta dan Ibu Rumah Tangga sebesar 13,3%, Wirausaha 9%.

## 2. Pembahasan

### a. Frekuensi

No.	Instrumen	Rasio Jumlah %	
		Ya	Tidak
1	<b>Faktor Individu</b>	24,4 %	75,6 %
	Telah bayar PKB		
2	Fungsi PKB	62,2 %	37,8 %
3	Paham cara bayar PKB	53,3 %	46,7 %
4	Sanksi PKB	77,8 %	22,2 %
5	Rela bayar PKB	88,9 %	11,1 %
6	<b>Faktor Ekonomi</b>		
	Membayar PKB dibawah penghasilan	46,7 %	53,3 %
7	Kesulitan ekonomi bayar PKB	62,2 %	37,8 %
8	Kebutuhan hidup terpenuhi setelah bayar PKB	71,1 %	28,9 %
9	Pendapatan masih cukup bayar PKB	77,8 %	22,2 %

<b>Faktor Sosial</b>			
10	Kualitas pelayanan PKB	44,4 %	55,6 %
11	Motivasi bayar PKB	88,9 %	11,1 %
12	Ikhlas bayar PKB	93,3 %	6,7 %
13	Kendala bayar PKB	71,1 %	28,9 %
14	Kontibusi pembangunana Belakang Padang	86,7 %	13,3 %

**Sumber: Hasil Olah Data (2018)**

Faktor yang dominan dalam kepatuhan pajak KB-R2 di Belakang Padang, adalah: faktor sosial sebesar 76,9%, disusul faktor ekonomi 64,5% dan faktor individu 61,3%.

## 2. Persepsi WP-KB R2

Hasil reduksi data dari wawancara bahwa wajib pajak kendaraan bermotor (R2) di Belakang Padang diketahui sebagai berikut:

1. Membayar pajak-KB karena ingin menghindari denda.
2. Tidak membayar pajak tetapi dapat mengendarai kendaraan bermotor.
3. Tidak membayar pajak-KB karena kondisi ekonomi sulit.
4. Waktu yang sempit untuk ke Batam melakukan pembayaran PKB-R2.
5. Pembayaran pajak-KB yang rumit untuk kendaraan yang belum balik nama.
6. Kesulitan membayar pajak PKB kerana belum ada pelayanan di Belakang Padang.
7. Kurang memahami fungsi PKB.
8. Tidak terdapat kegiatan Razia.

9. Kurang merasakan pembangunan infrastruktur.
10. Kurang merasakan sosialisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak KB-R2 di Belakang Padang adalah faktor sosial sebesar 76,9% terdiri dari: kualitas pelayanan, motivasi. ikhlas, kendala, kontribusi pajak. Disusul faktor ekonomi 64,5% dan faktor individu 61,3%.
2. Persepsi wajib pajak-KB R2 di Belakang Padang, bahwa: (a) membayar pajak KB-R2 karena untuk menghindari denda; (b) Tidak membayar PKB-R2 karena tidak terdapat kegiatan razia pajak-KB; (c) kesulitan ekonomi; (d) sulit menjangkau pelayanan SAMSAT akibat waktu dan kondisi geografis; (e) kurang memahami fungsi pajak kendaraan bermotor.

### Saran

Pengembangan strategi peningkatan kepatuhan pajak KB-R2 di Belakang Padang, pihak terkait (*stake holder*) agar melakukan sebagai berikut:

1. Membuka pos pelayanan SAMSAT di Belakang Padang atau di pelabuhan Sekupang (penyeberangan).
2. Menyelenggarakan razia pajak kendaraan bermotor.

3. Mengoptimalkan penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat dan fungsi PKB.
4. Melakukan kegiatan/kampanye bahwa pembangunan merupakan hasil PKB yang dibayarkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT.Gramedia.
- Hamta, Firdaus. (2015). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Deepublish
- Hamta, F. (2016). Analisis Penerapan Data Mining Dalam Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Samsat Batam. DIMENSI, 1(3).
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Simanjutak, Timbul dan Imam Mukhlis.2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor. Raih Asa Sukses.